Tradisi Hukum dan Inovasi Digital: Menakar Posisi Produk *E-Notary* pada Sengketa Perdata

(Legal Tradition and Digital Innovation: Assessing the Position of e-Notary Products in Civil Disputes)

Dwi Suryahartati⁽¹⁾

Faculty of Law, Universitas Jambi

Jl. Raya Jambi-Muaro Bulian Km. 14, Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia.

Email: dwisurya@unja.ac.id

Windarto⁽²⁾

Faculty of Law, Universitas Jambi

Jl. Raya Jambi-Muaro Bulian Km. 14, Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia.

Email: mas_wiend@unja.ac.id

Lestari⁽³⁾

Ikatan Alumni Notariat Universitas Jambi (IKANO)

Jl. Raya Jambi-Muaro Bulian Km. 14, Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia.

Email: lestaribgp@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital berimplikasi pada Jabatan Notaris. Untuk beradaptasi dengan zaman, notaris elektronik menjadi inovasi dalam pelayanan hukum yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Namun, penerapannya menjadi tantangan bagi tradisi hukum notariat yang berbasis pada prinsip konvensional. Khususnya pada aspek keabsahan dalam penyelesaian sengketa. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan mengkritisi konvergensi prinsip hukum Notaris Konvensional dengan Inovasi teknologi, sehingga mampu menentukan posisi hukum produk E-Notary dalam sistem Hukum Positif Indonesia. Dan mengkaji bagaimana kekuatan pembuktian dan perlindungan hukum pada penyelesaian sengketa yang melibatkan e-Notary. Problem hukum tersebut akan dibahas secara yuridis normatif hingga etik, antara legal tradition dan technological disruption dengan menggunakan teori otentisitas akta, Legal system dan perlindungan hukum. Melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan dan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan. Penelitian ini menemukan bahwa produk e-Notary hanya dapat dianggap sah jika memenuhi prinsip hukum acara perdatan tunduk pada Lex Spesialis. Posisi hukum E-Notary adalah conditional validity, akibatnya produk e-Notary belum dapat otomatis memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.

Kata kunci: *e-Notary*, transformasi digital, tradisi hukum, pembuktian.

ABSTRACT

The advancement of digital technology has significant implications for the notary profession. To adapt to the times, the concept of electronic notary (e-Notary) has emerged as an innovation in legal services, which increases efficiency and accessibility. However, its implementation challenges traditional notary practices rooted in conventional legal principles, especially regarding the validity of documents in dispute resolution. This study examines and critically assesses the convergence between conventional notary law and technological innovation, determining the legal status of E-Notary products in the Indonesian positive legal system. This study also explores the evidentiary power and legal protection in disputes involving e-Notary documents. Legal issues are analyzed through a normative juridical and ethical approach, addressing the tension between legal tradition and technological disruption, by applying the theory of authentic deeds, legal systems, and legal protection. This study concludes that e-Notary products are conditionally valid and do not automatically have the full evidentiary power of an authentic deed. The evidentiary power of e-Notary takes into account the formal and substantial elements of the deed by considering the applicable digital verification standards. Effective protection for the parties includes preventive and repressive legal protection

Keywords: E-Notary, digital transformation, legal tradition, evidentiary power.

I. PENDAHULUAN

Saat ini interaksi apapun semakin mudah, globalisasi perdagangan, teknologi, budaya, dan informasi, dan transaksi semakin cepat dan efisien. Globalisasi juga memfasilitasi pertukaran ide, inovasi, serta budaya lintas batas, yang menciptakan masyarakat yang semakin terhubung dan saling bergantung. Era ini juga membawa tantangan, termasuk hukum. Hukum Kenotariatan adalah salah satu wilayah hukum yang sangat dipengaruhi. Notaris sebagai pejabat public mendapatkan tantangan dalam rotasi teknologi ini. Beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi oleh seorang notaris dalam melakukan pekerjaannya yaitu *e-notary*, *cyber notary*, dan notaris elektronik, dan notaris jarak jauh. Konsep ini memunculkan berbagai pendapat, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Bahkan di banyak negara diskusi ini masih terus berlanjut seperti yang dapat dilihat pada perkembangan Notaris elektronik di Jerman. Perkembangan disruptif melanda pekerjaan notaris melalui teknologi digitalisasi notaris, teknologi blockchain, atau *cloud computing*. Di Jerman

Notaris terbagi dua kategori yaitu notaris paruh waktu dan notaris pengacara tergantung dimana asal negara federalnya. Konsep notaris elektronik tidak dapat begitu saja dilaksanakan karena dipengaruhi berbagai rezim regulasi yang memberikan kategori bagi notaris. Dalam hal integrasi, negara sangat penuh pertimbangan dalam memahami fungsi-fungsi digital bagi notaris, yang utama dibahas adalah digitalisasi kantor notaris (Koos, 2023). Notaris elektronik adalah konsep yang dijalankan dalam aktivitas profesi Notaris dengan menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan tugas pembuatan aktanya menggunakan media elektronik (Maulina et al., 2021).

Dalam regulasi di Indonesia, tersirat ketentuan notaris elektronik dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN-P, yaitu “notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Penjabaran mengenai kewenangan lain tersebut kemudian dapat ditemukan pada Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJNP yaitu “kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta Ikrar Wakaf, dan hipotek pesawat terbang”. Menurut Kadek, mensertifikasi dapat ditafsirkan sebagai pembuatan sertipikat terhadap transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik, walaupun pengertian ini mengandung multi tafsir (Kadec & Widiasih, 2020).

Semangat efisiensi yang menghindari kebutuhan pertemuan fisik menjadi latar belakang notaris jarak jauh. Alasan mendasar yaitu penghematan waktu dan sumber daya bagi Notaris dan penghadap, penghematan biaya dan tempat penyimpanan dokumen secara fisik, karena menghadirkan paperless. Alasan lain adalah kemudahan akses melalyu

layanan notaris secara online sehingga menghapus kendala geografis. Sahdan menyampaikan bahwa justru notaris elektronik memberikan peningkatan keamanan dokumen melalui otentikasi yang kuat dan teknologi pembuktian pemalsuan, dan memastikan integritas dokumen yang telah dilegalkan (Sahdan & Kucoro Sasmita, 2023). Namun di sisi lain, pandangan tradisional terkait keabsahan akta yang dibuat melalui cyber notary masih memegang azas konservatif yaitu asas *tabellionis officium fideliter exercebo*. Azas ini memberi arti bahwa seorang notaris harus bekerja secara tradisional dan tidak menghendaki kerja cyber notary dalam persoalan menghadapnya para pihak. Kecuali terhadap satu perbuatan yang telah ditentukan untuk dapat dilakukan dengan metode elektronik seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik melalui media elektronik Tele Conference, yang telah dilegitimasi dengan Peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 16 Tahun 2020 (Pratama, 2022).

Era baru menggeser kebiasaan dalam hukum kenotariatan untuk mengikuti perkembangan zaman. Notaris harus mengikuti perkembangan tersebut agar dapat membuat akta secara elektronik. (*cybernotary*). (Pangesti et al., 2021) Dalam beberapa putusan Pengadilan, dapat dilihat bahwa produk E-Notary menjadi objek gugatan. Sebagaimana pada putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 35/Pdt/2021/PT.KDI, dimana putusan hakim terkait keabsahan akta relaas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RPU SLB) yang dilakukan secara video Conference. Pengadilan menyatakan bahwa akta tersebut sah, dengan pertimbangan bahwa bentuk akta, kewenangan pejabat umum, dan isi akta telah memenuhi syarat, serta isi akta RPU SLB telah diketahui dan disepakati para pihak dan keberlakuan tersebut juga berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Untuk menjadi bagian penting dalam penggunaan internet, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) memberikan arahan bahwa penggunaan ruang digital harus bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, sehingga memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/ atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum termasuk dalam lalu lintas tugas dan tanggung jawab Notaris. Hal mana sudah diatur dalam Pasal 5 UU ITE ayat (1) bahwa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Notaris yang dalam jabatannya bersentuhan dengan teknologi, tentu tidak dapat menolak perkembangan zaman dan bersentuhan dengan dokumen elektronik, hal ini perlu menjadi perhatian hukum di sela tradisi hukum Notariat di Indonesia yang konvensional (Alkatiri et al., 2023). UUJN-P memberikan pedoman tersirat bahwa sebagai pejabat public dapat memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Aulia et al., 2023). Kewenangan lain dalam hal ini, secara tersirat memberikan pintu dalam dunia kenotariatan untuk dapat meminimalisir penggunaan kertas dan Kehilangan dokumen pelaporan. Bahkan konsep notaris elektronik menawarkan pengalihwujudan minuta dan salinan akta ke dalam bentuk elektronik melalui *scanning files*. Hal ini adalah perubahan mendasar dari bergesernya pandangan notaris tradisional atau konvensional ke notaris digital. Tentunya hal ini juga berdampak pada pembinaan dan pengawasan terhadap kerja notaris. Di

Tengah fenomena kedisiplinan akan kewajiban penyimpanan akta yang diamati penulis yang mulai berkurang Tingkat kedisiplinan akan tugas dan kewajiban jabatan. Terdapat notaris yang belum menjilid dan menyimpan aktanya dengan baik sesuai Amanah undang- undang. Maka, Khalkove berpendapat bahwa penyimpanan secara elektronik dapat meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dan ruangan atau tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan protokol notaris dapat diminimalisir. Walaupun keadaan ini tidak menjamin keamanan menjadi lebih baik, bahkan kejahatan cyber dan computer menjadi musuh baru bagi aktivitas notaris elektronik, terutama terkait data pribadi para pihak (Kalkhove et al., 2023). Keamanan data pribadi juga menjadi perhatian serius. Hal ini seperti profesi notaris yang kini dituntut untuk dapat menjaga keamanan data setiap kliennya. Notaris dapat berperan dalam mencatat dokumen digital penting, seperti akta dan kontrak, yang dapat membantu mencegah manipulasi (Sugianto et al., 2020). Meskipun notaris elektronik menawarkan efisiensi dan aksesibilitas yang lebih baik, ada berbagai tantangan hukum yang harus dihadapi. Salah satunya adalah validitas dan otentisitas dokumen elektronik, di mana tanda tangan digital dan keamanan data menjadi isu penting. Isu penting lain yang berhubungan dengan kerja notrais adalah perkembangan kejahatan computer yang memberikan potensi besar akan keterlibatan notaris, seperti kejahatan *money loundry* (Hutauruk et al., 2023). Maman Budiman dalam tulisannya memberikan pernyataan bahwa Notaris dilindungi oleh undang-undang ketika berhubungan dengan klien, termasuk Ketika klien tersebut mendapatkan harta kekayaannya dari hasil perbuatan pidana, yang penting tidak melanggar kode etik profesi (Budiman, 2023). Penulis tidak sependapat

untuk itu. Karena setiap notaris akan melaksanakan tugasnya membuat akta selalu dibarengi dengan satu kewajiban lainnya, yang salah satunya adalah mengetahui penerima manfaat dari suatu perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh kliennya atau penghadapnya. Dalam perbuatan jabatannyapun Notaris mendapatkan pengawasan dan pembinaan. Setuju dengan pendapat Irwan bahwa dibutuhkan Pengawasan dan pembinaan atas tindakan serta perilaku jabatan yang mengikuti perkembangan zaman, mengingat tugas keprofesian Notaris rentan dengan persoalan moral dan nilai-nilai etika (Indrapradja, 2018).

Dalam kaitannya dengan seluk beluk pekerjaan dalam Jabatan, hal-hal yang bersifat digitalisasi merupakan suatu keniscayaan. Namun di Indonesia regulasi yang mengatur kewenangan notaris dalam dunia digital masih terbatas dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ketiadaan standar yang jelas mengenai penyimpanan dokumen elektronik juga menimbulkan risiko terhadap perlindungan privasi dan integritas dokumen. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi dan penerapan teknologi keamanan yang kuat untuk memastikan bahwa notaris elektronik dapat berfungsi dengan efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Permadi et al., 2024). Seperti yang dinyatakan dalam konsideran UUJN-P bahwa bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Hukum harus hadir dalam setiap kondisi masyarakat, termasuk dalam era digital ini. Semangat Tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian, keadilan dan kebermanfaatan. Untuk kebersamai aktivitas notaris

elektronik, tujuan hukum harus terpenuhi (Disemadi, 2022). Walaupun menurut Agus sulit untuk menentukan apakah tujuan hukum dapat dilaksanakan secara proporsional. Tetapi setidaknya masyarakat dapat merasakan adanya upaya dari negara untuk mencapainya, sehingga tidak terjadi kesenjangan di antaranya (Setiawan, 2017). Namun, pandangan Afdhali berbeda bahwa di antara tiga tujuan hukum itu mengandung *Spannungsverhältnis* (ketegangan). Dimana di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut mempunyai tuntutan yang berbeda. Sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Ada kalanya kepastian hukum menggeser nilai keadilan dan kemanfaatan (Afdhali & Syahuri, 2023). Di sinilah perlu kebijaksanaan dalam menghadapi ancaman bagi tradisi hukum kenotariatan dengan hadirnya paradigma notaris elektronik

Hukum adalah suatu sistem yang dinamis, selalu berubah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, hukum tidak hanya dipengaruhi oleh norma dan nilai sosial, tetapi juga oleh perubahan teknologi, politik, ekonomi, serta budaya (Kadir & Musataklima, 2024). Apa yang dianggap benar atau adil di masa lalu, mungkin tak lagi relevan di masa kini, sehingga hukum harus terus beradaptasi agar tetap dapat menjawab tantangan-tantangan baru. Oleh karena itu, perubahan hukum merupakan hal yang tak terhindarkan dalam menjaga keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat yang terus berkembang (Antari, 2022). Seperti yang terjadi pada masa pandemi misalnya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 menetapkan kerangka hukum penyelenggaraan persidangan secara elektronik. Hal ini dimungkinkan juga terjadi pada layanan jabatan Notaris. Seperti dalam penelitian Naura Humam Alkatiri, yang menyatakan bahwa layanan untuk

Janabatan Notaris belum tersedia. Alasan yang mendasarinya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengharuskan notaris hadir secara langsung untuk mengesahkan dokumen kertas dan pengesahannya tidak dapat dilakukan secara daring. Kemudian akta notaris dalam konteks dokumen elektronik tidak diakui sah menurut Pasal 5 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024. (Alkatiri et al., 2023). Penelitian lain yang dilakukan David Tan memberikan argumentasi bahwa Notaris di Indoensia tidak akan beralih menjadi notaris elektronik untuk selamanya, meskipun zaman berubah. Regulasi yang ada saling tumpang tindih dan terlalu kontroversial (Tan, 2020).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas digitalisasi dalam profesi notaris, sebagian besar studi lebih berfokus pada aspek teknis implementasi notaris elektronik, seperti keamanan dokumen digital, tanda tangan elektronik, dan validitas hukum dalam sistem E-Notary, hingga ketidakmungkinan mewujudkan notaris elektronik. Beberapa penelitian juga menyoroti efisiensi dan kemudahan akses dalam layanan notaris berbasis teknologi. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara spesifik meneliti bagaimana transisi menuju notaris elektronik. Maka, penelitian ini akan merumuskan persoalan hukum yang focus pada bagaimana posisi Hukum Produk E-Notary dalam Sistem Hukum Positif Indonesia? dan mengkaji bagaimana kekuatan pembuktian dan perlindungan hukum pada penyelesaian sengketa yang melibatkan E-Notary?

Penelitian ini menawarkan persepektif baru dengan menyoroti beberapa tradisi hukum notariat dalam sistem hukum yang berbeda. Dengan tetap

memfokuskan pada analisis status hukum E-Notary, bagaimana kekuatan pembuktiannya dan bagaimana perlindungan hukumnya serta bagaimana legislasi masa depan di antara tradisi hukum notaris yang mengalami degradasi. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi strategi adaptasi yang dapat dilakukan, termasuk reformulasi regulasi, rekonstruksi peran notaris dalam ekosistem digital, serta penerapan mekanisme keamanan hukum berbasis teknologi yang tetap mempertahankan nilai kepastian dan otentisitas dokumen. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi posisi hukum E-Notary dalam satu tradisi hukum, tetapi juga menawarkan solusi konkret untuk mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip dasar sistem notariat di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah penelitian preskriptif dengan karakter sui-generis. Ciri dari sui-generis dapat dilihat dari; Sifat Empiris Analitis, dimana mampu memaparkan isi (struktur) hukum yang berlaku; mampu membuat sistematisasi gejala yang dianalisis; memberikan penafsiran/Hermeneutik; mampu memberi nilai pada yang berlaku; dan mampu menawarkan model teoritis terhadap praktek hukum (Ariawan, 2013). Penelitian ini Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan kasus diperlukan untuk melihat bagaimana *law in action* dalam realitas baru, terutama teknologi. Sehingga dapat dilihat pola sengketa dan kecenderungan pertimbangan hakim, dan pada akhirnya mampu membangun rekomendasi hukum yang realistis. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori legal system, Teori otentisitas

akta dan Teori Perlindungan Hukum. Fokus utama adalah menganalisis bahan-bahan hukum yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan literatur hukum, dan beberapa kasus hukum serta putusan pengadilan yang relevan untuk menjawab pertanyaan hukum yang diajukan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ditinjau melalui tahap inventarisasi, sistematisasi, interpretasi, dan evaluasi. (Nasution, 2008).

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Posisi Hukum Produk E-Notary dan Perkembangan Notaris di beberapa Negara

Saat ini sejarahwan mengklaim bahwa bahwa Lembaga notariat yang dikenal pada saat sekarang dimulai pada kurang lebih abad ke sebelas di Italia Utara sebagai tempat asal notariat, dengan ciri-ciri tercermin dalam pengangkatan notaris, yaitu notaris diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan umum dan menerima honorarium dari masyarakat umum sebagai pejabat yang satu-satunya berhak untuk membuat akta-akta baik di dalam maupun di luar pengadilan. Notaris yang ada pada saat itu di Italia memiliki persamaan dengan notaris pada saat sekarang, yaitu notaris diangkat dalam kedudukannya sebagai pejabat untuk membuat akta yang dibutuhkan masyarakat. Perbedaan penting yang terdapat adalah bahwa akta-akta yang dibuat oleh notaris yang diangkat termaksud, tidak mempunyai kekuatan otentik dan juga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana yang dimiliki oleh notaris-notaris pada saat ini. Artinya ada Notaris yang diangkat oleh Kerajaan yang dapat membuat akta otentik, dan Notaris tidak diangkat Kerajaan, yang hanya mempunyai hak

mengeluarkan akta di bawah tangan. Begitu juga di negara dengan stelsel Anglo-Saxon dikenal adanya notaris atau *Notary Public* yang berbeda fungsi dan tugasnya dengan notaris (*Civil Law Notary*) pada negara dengan stelsel Kontinental (Latin). Di Inggris, terlihat adanya *notary public*, yang terdiri dari *notary public* di London dan *notary public provensial/provinsi* yang tugas utamanya memberi pernyataan akan kebenaran tanda tangan atau dalam hal protes wesel. Jabatan *notary public* di London diemban oleh notaris yang tergabung dalam *Scrivener' Company*. Di sini mereka harus mengikuti ujian dan magang. Tidak sama dengan notaris di luar London yang memiliki tugas memberi nasihat, menyusun dokumen untuk keperluan hubungan perjanjian dengan luar negeri. Di Amerika setiap negara bagian memiliki kewenangan untuk mengatur profesi notaris sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap negara bagian itu sendiri. Misalnya di New York, terdapat duaundang-undang utama yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan notaris, yaitu "Executive Law", "Public Officers Law", dan "New York Codes, Rules, and Regulations." Ketiga undang-undang tersebut berada di bawah yurisdiksi *Notary Public License Law* yang dikelola oleh New York Department of State.

Notaris di Jerman hamper sama dengan Notaris di Indoensia. Tugas dan wewenangnya mengesahkan salinan dokumen, memberikan sumpah dan pernyataan, serta mengambil pernyataan tertulis dan pernyataan tertulis. Notaris di Jerman juga berperan sebagai pihak di luar para piak/penghadap yang bersikap independent dan mandiri. Dapat memastikan keaslian dokumen yang dihadirkan dihadapannya. Namun di Jerman ada dua kategori notaris yang tergantung pada negara federal dimana notaris berwilayah jabatan. Pertama Notaris penuh waktu ('Nur-Notar') yang mengikuti notaris

dengan sistem di Perancis, contohnya negara bagian Bavaria. Kedua adalah notaris pengacara. Notaris bertanggung jawab untuk menjadi saksi dan mengesahkan keaslian dokumen dan transaksi hukum. Notaris di Jerman lebih memiliki kewenangan daripada Notaris Amerika yang terbatas hanya pada sertifikasi, yaitu untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, memastikan bahwa semua dokumen dan perjanjian mengikat secara hukum dan dapat diberlakukan. Notaris juga bertanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat dan dokumen resmi, seperti akta, surat kuasa, dan surat wasiat, dan lain-lain. Dasar hukum bagi notaris di Jerman yaitu Kode Federal Jerman untuk Notaris ('BNotO')

Di Italia utara di daerah pusat perdagangan lembaga notariat mulai dikenal. pada abad-11 atau ke-12 dinamakan *Latinjse Notariaat*. Dengan demikian *Latinjse Notariaat* tidak berasal dari Romawi Kuno. Arus peradaban manusia yang menyebabkan istilah tersebut meluas di seluruh daratan Eropa mulai dari Spanyol, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Negara yang tidak ikut meresepsi *Latinjse Notariaat* adalah Kerajaan Inggris dan sebagian besar dari negara Skandinavia. Di Negara Inggris sebenarnya juga mengenal istilah Notaris namun berbeda dengan yang dikenal di Eropa. Notarius di Romawi bertugas melayani pejabat Romawi untuk mencatat pidato dan pembicaraan pejabat, artinya melayani kepentingan pejabat tinggi negara. Fase baru kenotariatan dimulai saat Raja Karel Agung membuat sistem baru yang menempatkan notaris pada tiap pengadilan daerah untuk mencatat hal-hal yang terjadi selama persidangan. Notaris jenis ini dinamakan *notarius comitatus* atau *notarius civitatis*.

Notaris mulai masuk ke Indonesia menurut G.H.S Lumban Tobing merupakan Notaris yang seperti dikenal di Zaman "*Republik der verenigde*

Nederlanden yaitu pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Oost Compagnie* di Indonesia. Notaris bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia (Adjie, 2008). Pada masa kedudukan VOC (*Vereenigde Oost- Indische Compagnie*) Notaris adalah pegawai, sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Notaris diberi kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang prokureur mencampuri urusan kenotariatan sejak Tahun 1650an. Hal yang khas pada zaman itu adalah bahwa pemerintah Hindia Belanda menetapkan formasi atau kuota notaris di setiap daerah. Semula hanya satu orang, kemudian Tahun 1654 ditambah menjadi dua orang, kemudian menjadi lima orang pada Tahun 1671 dengan ketentuan empat orang harus bertempat tinggal di dalam kota dan satu orang bertempat tinggal di luar kota (Saputra, 2008). Kedudukan Notaris di Indonesia di tengah-tengah masyarakat masih cukup tinggi prestisenya. Notaris di Indoensia adalah pembuat dokumen yang kuat.

Jabatan Notaris dapat menjamin *continued* hak dan kewajiban artinya pejabat yang menduduki jabatan Notaris selalu berganti-ganti, sedangkan Jabatan tetap berjalan terus-menerus (*continue*). Berganti dapat dikatakan bertambah, berkurang, digantikan karena pengangkatan, pemberhentian dan lainnya. Notaris sengaja diadakan oleh Negara dalam sistim hukum Indonesia yang merupakan suatu lingkungan pekerjaan tetap dan berkesinambungan. Sebagai suatu Jabatan, Notaris berperan dalam menyelenggarakan suatu Negara hukum dan ikut menegakkan hukum. Peran tersebut dapat dilakukan karena sebuah kewenangan yang melekat pada suatu Jabatan. Kewenangan dapat diperoleh atau bersumber dari atribusi, delegasi maupun mandat. Mengenai kewenangan dalam suatu negara hukum

asas legalitas adalah prinsip yang harus diperhatikan. Peran Notaris semakin meningkat di era digitalisasi hingga berkembang istilah cyber notary. Untuk melayani sekitar 270 juta orang di Indonesia terdapat kurang lebih 21.000 Notaris. Jumlah ini harus diverifikasi dengan standar kompetensi digitalisasi para notaris tersebut. Cyber notary di beberapa negara Eropa dan benua Amerika telah diterapkan lebih dulu. Negara-negara Eropa seperti Spanyol dan Inggris Raya yang dimana notaris telah beralih ke tandatangan berbasis atau secara elektronik dengan menggunakan teknologi kunci publik, hal ini berkesesuaian pula dengan peraturan pemerintah setempat yang juga memfasilitasi. Di Amerika Serikat telah menggunakan sistem tandatangan secara atau berbasis elektronik sejak tahun 2007. Selain itu, negara-negara Asia, khususnya Jepang, meningkatkan status notaris mereka menjadi cyber notary 15 tahun yang lalu (Selva Omiyani, 2024).

Di Indonesia, meskipun UUJN-P belum secara eksplisit mengatur keberadaan e-Notary, namun landasan normatif dapat ditelusuri melalui pengakuan atas dokumen dan tanda tangan elektronik dalam UU ITE. Ini menunjukkan bahwa produk E-Notary berpotensi diakui sebagai instrumen hukum yang sah, selama memenuhi syarat keautentikan, integritas, dan otorisasi pejabat publik (Fahamsyah et al., 2022). Estonia dan Amerika Serikat, praktik *e-notarization* telah berkembang lebih maju. Estonia, mengintegrasikan sistem kenotariatan dengan digital identity system berbasis blockchain, sementara beberapa negara bagian di Amerika Serikat seperti Virginia dan Texas telah melegalkan remote online notarization (RON) yang memungkinkan pengesahan akta melalui konferensi video. Perbandingan ini mencerminkan bahwa perkembangan E-Notary sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, kebijakan hukum nasional, serta penerimaan

masyarakat dan profesi terhadap transformasi digital dalam layanan hukum.

Posisi hukum produk E-Notary di Indonesia saat ini masih berada dalam wilayah transisi dan pengembangan, karena belum ada pengaturan eksplisit dan komprehensif yang mengatur secara langsung tentang akta notaris elektronik sebagai produk hukum yang setara dengan akta otentik konvensional. Pada praktiknya tidak semua produk E-Notary dapat disetarakan dengan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Alasan normatifnya selain belum eksplisit diakui dalam UUJN-P, dalam UU ITE dukungannya masih terbatas. Implikasinya adalah sebagai alat bukti adalah sah, namun sebagai akta otentik belum tentu. Memang tidak semua produk E-Notary menjadi akta otentik, namun otentisitas akta akan dipertaruhkan. Jika merujuk pada teori otentisitas akta yang dikemukakan oleh Subekti, bahwa akta otentik merupakan bukti tertinggi dalam pembuktian. Bila terjadi penyimpangan dalam hal bentuk dan prosedur, maka dapat menyebabkan hilangnya kekuatan pembuktian dan/atau turunnya derajat pembuktian. Dalam tulisan Kobis Fernando yang mengutip dari Achmad Ali dan Wiwie Heryani, terdapat lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat-alat bukti, yaitu: 1) Kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap (*volledig bewijskracht*); 2) Kekuatan pembuktian yang lemah, yang tidak lengkap (*onvolledig bewijskracht*); 3) Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijskracht*); 4) Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*); dan 5) Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs atau kracht van tegen bewijs*) (Kobis, 2017). Bisa saja E-Notary menggantikan posisi akta otentik atau setara dengan akta otentik konvensional asalkan mampu menjamin unsur-unsur otentisitas yaitu Kehadiran (yang bisa ditransformasikan menjadi “kehadiran digital” dengan

otentikasi biometrik/video conference), Kewenangan notaris, dan Protokol penyimpanan akta elektronik yang sah. Unsur tersebut tidak dapat hanya bersifat implisit.

Putusan Mahkamah Agung No. 666 PK/Pdt/2011 menegaskan bahwa akta notaris yang tidak memenuhi syarat formalitas, seperti tidak dibacakan atau tidak ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris, tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali dan menyatakan bahwa syarat formil pembuatan akta adalah mutlak untuk akta disebut otentik. Putusan ini menegaskan bahwa kehadiran fisik dan pembacaan akta adalah elemen penting keotentikan. Putusan yang dibuat sebelum diundangkannya UU ITE dan perubahan UUJN memberikan gambaran bahwa aspek formalitas tetap menjadi syarat mutlak dalam pembuatan akta otentik, yang menjadi tantangan dalam penerapan E-Notary di Indonesia. Begitu juga dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 35/Pdt/2021/PT KDI. Sengketa terkait keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan secara virtual (online). Dalam Putusannya Majelis hakim mengakui bahwa mekanisme rapat daring dapat dilegalkan apabila seluruh proses dapat diverifikasi dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam UUJN, pengadilan membuka ruang untuk penerimaan praktik E-Notary dalam proses legal formal. Namun, keabsahan tetap bergantung pada pemenuhan syarat formal dan autentikasi digital. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XXII/2024 terkait uji material beberapa Pasal dalam KUHperdata yang salah satunya adalah pasal 1868 KUHperdata. Pada putusannya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak, namun MK membuka ruang untuk reinterpretasi hukum konvensional dalam konteks digital, tetapi

tetap mengingatkan pentingnya perlindungan hukum dan pengesahan legislatif yang tegas, artinya E-Notary dalam bentuk dan prosedur membutuhkan reformasi hukum secara sistemik, bukan sekadar adaptasi teknis.

B. Kekuatan Pembuktian dan Tantangan Hukum Notaris Elektronik di Era Digital

Notaris sebagai pemberi layanan hukum memiliki peran krusial untuk memastikan kepastian, keabsahan, dan perlindungan hukum bagi transaksi masyarakat. Sesuai kewenangannya dalam segenap peraturan perundang-undangan. Notaris juga berperan sebagai pencegah potensi konflik di kemudian hari, dan sebagai mitra strategis dalam menciptakan kepastian hukum yang adil dan transparan tanpa memihak. Kewenangan notaris didapat melalui atribusi. Atribusi yang dimaksud di sini bukanlah atribusi atas pembagian kekuasaan, namun atribusi yang didapat dari keahlian dan keterampilan khusus suatu jabatan Notaris. Momentum penyerahan kewenangan dari negara kepada seseorang yang akan menjabat sebagai Notaris adalah pada saat pengangkatannya. Berarti dilihat dari tanggal pada surat pengangkatannya. Mulai saat itu negara memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melaksanakan wewenang-wewenangnya sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penulis menyatakannya dengan *attribution of Nobellium*. Dilekatkan kepadanya (Notaris) sebagai pejabat karena keahliannya, karena keterampilannya, karena pendidikannya. Tidak dapat semua orang menduduki jabatan (Notaris) tersebut bila tidak melekat syarat keahlian, keterampilan dan pendidikannya. Inilah suatu jabatan yang saya katakan sebagai jabatan yang *suigeneris*. Dengan memperoleh kewenangan secara *attribution of Nobilium*, Notaris menjalankan wewenang-

wewenangannya dengan bekal keilmuan hukum tertentu dan keterampilan hukum tertentu pula. Hal mana tidak dapat diberikan kepada setiap orang yang tidak memenuhi syarat untuk itu. Hukum Notaris semakin berkembang, terutama yang dipengaruhi oleh teknologi. Berbagai istilah tentang notaris digital menjadi konsep yang harus dipahami secara menyeluruh. Notaris jarak jauh misalnya (*Remote online notary*), Notaris diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akta notaris, dimana para pihak tidak berada pada tempat yang sama dengan Notaris, dengan cara berkomunikasi menggunakan audio video, dimana mereka saling melihat dan mendengar satu sama lainnya. Atau terkait penggunaan sidik jari yang juga endapat pengaruh dari aktivitas notaris elektronik. Penggunaan data biometric berpotensi menghasilkan masalah. Karena sidik jari yang diambil dan disimpan secara elektronik, tanpa adanya sistem untuk mencocokkan identitas secara langsung pada database referensi data kependudukan yang tunggal, belum dapat berfungsi sebagai sarana verifikasi diri dari pengguna sistem elektronik (Maani, 2024). Secara sosiologis notaris elektronik atau notaris jarak jauh memang memberikan manfaat perspektif efisiensi. Dapat dimaklumi bahwa pelaksanaan notaris jarak jauh yang demikian memberi manfaat karena mempertimbangkan kondisi pandemi yang melanda dunia, khususnya pandemi Covid-19.

Beberapa negara telah melengkapi instrument hukumnya, namun tidak dengan Indonesia. Notaris cyber menjadi wacana yang terus didiskusikan. Di Amerika Serikat, selain notaris jarak jauh, ada pula notaris publik (*Public Nottary*) dan Notaris Elektronik (*E-Notary*). Ketiga notaris tersebut memiliki perbedaan dalam pemenuhan syaratnya, kewenangannya dan pejabat yang mengangkatnya. Berbeda dengan Notaris jarak jauh, Notaris Elektronik

cukup dikenal di negara Amerika dengan sebutan *E- Notarization*. Dalam Section 2.5 Mena 2017 dijelaskan konsep Notaris elektronik yang mencakup objeknya, esensinya, dan pejabat yang melakukannya. Andrew MacDougall memberikan pengertian Notaris elektronik yaitu : “ *Document are notarized in an electronic form where the signer uses an electronic signature but physically before the notary* (MacDougall, Andrew, Chodos, Michael: 9781796910858). Pada notaris elektronik menurut pandangan Dougall, bahwa akta notaris dibuat secara elektronik, pihak yang menandatangani akta adalah menghadap kepada notaris secara fisik dan aktanya ditandatangani secara elektronik (*electronic signature*). Sertifikasi ini sangat erat dengan otentisitas suatu akta. Berhubungan erat dengan keamanan informasi dan komunikasi berdasarkan kualifikasi tertentu (Puspitasari & Wahyudi, 2023).

Penerapan Notaris elektronik sebagai contoh dapat dilihat pada wasiat elektronik di Amerika. Esensi surat wasiat elektronik adalah surat wasiat yang ditandatangani secara elektronik. Dalam penandatanganan surat wasiat elektronik berdasarkan Uniform Electronic Wills Act mengatur konsep wasiat elektronik yang memenuhi unsur yaitu terhadap bentuknya, tandatangannya, saksi dan cara menghadapannya.

Akta Notaris, dan/atau produk E-Notary lainnya selama memenuhi persyaratan hukum dipastikan memiliki kekuatan oembuktian yang sama dengan akta otentik konvensional. Sampai sekarang masih mempedomani Pasal 1868 KUHPerdara yaitu:

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat.”

Tetapi dalam perkembangannya, Pasal tersebut perlu dimaknai dengan

interpretasi yang progresif. Akta elektronik dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan pembuktian otentik apabila memenuhi unsur berikut; 1) Dibuat oleh notaris yang berwenang, 2) Menggunakan media dan metode elektronik yang sah dan terverifikasi, 3) Memenuhi unsur identifikasi, autentikasi, dan integritas data, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, 4) Sistem elektronik yang digunakan terdaftar dan diaudit keamanannya.

Terdapat kelemahan dalam kesederhanaan penggunaan konsep notaris elektronik. Hal mana disebabkan oleh sifat publik jaringan internet yang dapat diretas oleh keunggulan teknologi yang lebih. Ini mengandung potensi kejahatan cyber dengan modus yang makin beragam dan canggih (Maulida, Dinamika, n.d.). Jika mengacu pada konsep cyber yang borderless, ini sangat bertentangan dengan konsep Jabatan Notaris yang mengacu pada wilayah jabatan. Akan menjadi problematika bila Notaris melakukan autentifikasi pada perbuatan yang mengandung unsur hukum internasional. Ikhsan dalam penelitiannya menyajikan uraian bahwa bagaimanapun Notaris dalam melakukan pekerjaannya, tetap mengacu pada hukum Nasional, karena sebagian besar subjek hukum internasional berada pada wilayah hukum Nasional. Karena hukum Internasional berlaku bila terjadi konflik atau perkara transaksi antar negara yang berbeda yang mengharuskan untuk menggunakan hukum internasional yang didasarkan pada hukum nasional kedua negara tersebut (Lubis et al., 2022), untuk inilah kekuatan cyber diperlukan dalam memberikan peluang bagi implementasi notaris elektronik yang melewati lintas batas negara. Inipun dalam konteks regulasi Indonesia belum adaptif.

Ancaman berikutnya adalah kemutkahiran teknologi elektronik yang dimiliki Indonesia. Dalam peresmian sebuah kata otentik diperlukan tanda

tangan. Tanda tangan dalam sistem notaris elektronik dapat menggunakan tanda tangan elektronik. Indonesia memiliki regulasi terkait tanda tangan elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penggunaan tanda tangan terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Sehingga menurut Lyta Sihombing, pembubuhan tanda tangan dapat merubah kedudukan suatu surat, bagi orang yang memiliki kepentingan didalamnya. Namun, tandatangan yang berkaitan dengan jabatan notaris belum ada regulasi yang mengatur secara eksplicit. Tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah bila memnuhi ketentuan Pasal 11 Undang- undangan Informasi dan Transaksi eketronik Nomor 11 Tahun 2008 (Lyta et al., 2020). Sehingga kedudukan tanda tangan , walau hanya berupa Maka kedudukan tanda tangan elektrornik walaupun hanya berupa kode, namun memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya dan akibat hukum yang sah selama syarat yang ada pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Wati, 2023). Kode-kode itu dihasilkan dari sitem computer yang diciptakan oleh manusia. Maka yang dapat merusaknya juga manusia. Karena berbicara tentang computer akan mendiskusikan tentang hak akses. Bahkan ancaman paling besar terhadap sistem-sistem computer adalah berasal dari dalam, misalnya para pegawai. Selain juga factor eksternal. Hingga bentuk aktivitas *computer fraud* juga dapat dipakai untuk melakukan kecurangan. Salah satu yang harus dipersamakan persepsinya dalam memandag digitalisasi notaris atau notaris elektronik adalah penggunaan tanda tangan elektronik. Penggunaan kriptografi

untuk membuat tanda tangan elektronik harus diperiksa bersama dengan keamanan dan kepercayaan yang ditawarkan oleh penggunaan sertifikat digital, harus juga memperhatikan aplikasi biometrik yang digunakan.

Regulasi global sangat dibutuhkan untuk ini untuk menangani semua bidang yang berhubungan dengan data, tanda tangan elektronik, keamanan informasi dan pengendalian teknologi enkripsi ditambah dengan risiko kejahatan dunia maya (Bharvada, 2002). Dalam hal ini, artinya bahwa kemudahan digitalisasi Notaris yang membuat tugas jabatan Notaris serasa mudah secara terbalik juga memiliki resiko yang tinggi terhadap kejahatan dan kecurangan. Notaris memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi, termasuk memverifikasi identitas para pihak, legalitas dokumen pendukung, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Prakoso & Sukirno, 2023).

Dalam membacakan akta otentik sebagai kewajiban Notaris, harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris. Keharusan hadir para pihak dan saksi ini menjadikan cyber notary menjadi kurang berfungsi. Walaupun untuk satu perbuatan hukum dapat dilakukan dengan video atau telekonferensi yang diakomodir dalam Undang-undang Perseroan terbatas. Tantangan akan penjaminan keabsahan dan keaslian para pihak dipertanyakan. Untuk hal demikian dalam penelitian Wijanarko mengemukakan bahwa akta cyber notary tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik karena akta elektronik tidak memenuhi syarat keaslian yang ditetapkan undang-undang. Inilah tantangan bagi integritas notaris. Berhadapan langsung dengan notaris termaktub dalam kepala akta. Apa yang dialami secara alamiah harus tertulis dalam klausul, sehingga pertemuan fisik ataupun tidak

juga mempengaruhi kluasul dalam akta. Sementara konsep cyber notary Sedangkan konsep cyber notary menyimpangi itu. Pertemuan fisik tidak mutlak, telah tergantikan dengan media elektronik. Di sinilah tradisi hukum civil law dengan norma dasar 1868 KUHpedrata terancam. Gondo menyatakan bahwa akan terjadi pertentangan antara produk yang dihasilkan notaris berupa kata otentik (Gondo et al., 2022).

Notaris harus memiliki sikap progresif sebagai bagian dari perpanjangan tangan negara untuk selalu hadir pada kehidupan awarga negaranya, terutama dalam meberikan perlindungan hukum. Nadia dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kehadiran notaris harus bermanfaat bagi Masyarakat, mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tuntutan zaman sebagai wujud penerapan pola tindakan profesionalisme notaris (Nadia, 2018).

C. Perlindungan Hukum Pihak-pihak pada sengketa yang terkait E-Notary

Dalam menggunakan platform digital, Notaris harus bersifat adaptif. Aktfitas membuat akta, menandatangani, mengesahkan dan menyimpan surat-surat dan akta otentik dapat dilakukan dengan cara digital. Penggunaan media itu berpotensi dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari berkaitan dengan kebasahan, keamanan data dan kepercayaan para pihak. Pihak-pihak yang berpotensi terlibat snengketa yaitu Notaris, penghadap, pihak ketiga, dan penyedia platform teknologi, terutama penyedia jasa E-Notary, bila terjadi kegagalan sistem dan kebocoran data. Terkait sengketa produk E-Notary terdapat beberapa tipe pekerjaan yang berhubungan dengan E-Notary yaitu terkait layanan sertifikasi yang berfungsi untuk membuktikan identitas dokumen elektronik dan layanan penyimpanan serta

layanan *share* dokumen dan pertukaran data (Najib, 2023). Kegiatan tersebut dapat berpengaruh pada keabsahan akta, sengketa seputar validitas tandatangan elektronik dan ketidakcocokan identitas digital. Kegagalan sistem keamanan dan/atau sistem eror. Dalam keadaan demikian hukum sebagai suatu sistem.

Hukum adalah suatu sistem, seperti yang diajukan oleh **Friedmann**, maka jangkauannya meliputi *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* (Tanya, 2019). Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan. Sinergitas keduanya adalah sebuah keniscayaan. Salah satu yang menjadi cita hukum adalah dengan tegaknya hukum itu sendiri. Menurut *Friedman* berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Budaya Hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga Masyarakat. Budaya hukum dalam hal ini menjadi bermigrasi dari dunia nyata ke dunia maya.

Banyak perkembangan terjadi di lapangan hukum dan fasilitas penegakan hukum, antara lain misalnya perubahan Ruang Sidang. Termasuk konsep berhadapan dengan Notaris. Konsep ruang dan berhadapan masih dianggap sebagai ruang tradisional. Penggunaan teknologi adalah "ruang". Maka konsep ruang akan pasti mengalami perubahan. Bukan semata real sebagai bentuk ruang bangunan, tetapi terbentuk ruang peradilan maya/artifisial (Susanto et al., 2022). Artinya

dalam konteks bernegara hukum, diperlukan perangkat yang adaptif untuk itu. Negara harus senantiasa mengakomodir kebutuhan hukum Masyarakat di masanya. Dimana pengguna hukum itu adalah seluruh elemen ternasuk penegak hukum dan profesi hukum. Penegakan hukum dan ekadilan sangat tergantung pada hukum yang diberlakukan. Undang-undang bagian dari hukum. Paul Scholten menyatakan bahwa hukum itu ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan (*Het recht is er, maar het moet nog worden gevonden*).

Pembacaan melalui Moral Reading terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia membawa keharusan untuk menata kembali cara kita berhukum, termasuk penataan dunia profesi hukum Indonesia. Asas tersebut dapat diimplementasikan dengan profesi yang mendukung itu, yaitu profesi hukum. Profesi hukum bagian dari proses peradilan langsung ataupun tidak langsung. Para penegak hukum dapat dilihat dari dua optik yaitu dilihat sebagai manusia dan dilihat dari institusi. Secara manusia sangat bergantung dengan karakter dan kualitas kerja masing-masing dalam menegakkan hukum, secara institusi lebih kompleks lagi yaitu bagaimana menegakkan hukum dalam sebuah sistem birokrasi. Disinilah peran profesi hukum yang perlu ditata kembali yang meliputi: perancang hukum (*legal drafter*), konsultan hukum, advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Polisi, Jaksa, Panitera, Hakim dan arbiter/wasit. Para penegak hukum sebagai bagian dari sistem hukum mestinya tidak memiliki keraguan dalam menerapkan hukum dan dalam membuat produk hukum ditengah perubahan konsep ruang secara hukum, termasuk notaris sebagai profesi hukum.

Bagi pandangan normatif, hukum harus disiapkan terlebih dahulu untuk menghadapi dunia. Namun tidak mudah mengikuti berkembangnya

dunia. Sementara kepastian hukum adalah suatu pencapaian tujuan hukum. Dalam hal ini kepastian hukum berkedudukan sebagai suatu nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Remaja, 2014) dalam melihat kepastian hukum harus dipandang holistik dari sisi epistemologi, ontology dan aksiologi. Sehingga nilai-nilai pencapaian hukum dapat terealisasi bukan sekedar ide. Nilai dapat diartikan “sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin”. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak disadari. Nilai yang terkandung dalam hukum dapat berupa nilai teori, nilai social, nilai ekonomi dan nilai pengambilan Keputusan. Dalam konteks notaris elektronik ini, penulis menambahkan nilai politik. Nilai teori akan terus melahirkan dan menumbuhkan teori yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat mendasari berkembangnya pembentukan peraturan perundangan. Nilai social memberikan makna bahwa huku memberi implikasi yang signifikan dalam pergaulan manusia sebagai subjek hukum. Nilai ekonomi memberikan deskripsi bahwa hukum memberikan kamoinan kepada manusia untuk memneuhi kebutuhan hidupnya tanpa diganggu manusia lainnya. Nilai dalam Pengambilan Keputusan memberikan makna bahwa hukum dijadikan dasar oleh para pengambil keputusan dalam mengeluarkan setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat, sehingga terhindarkan dari kesewenang-wenangan. Hukum dijadikan sebagai landasan berpijak oleh setiap pejabat di negara ini. Nilai ini sejalan dengan konsep negara hukum yang dianut di Indonesia. Sementara nilai politik

berkaitan dengan nilai kuasa. Sangat digantungkan pada political will penguasa dan bagaimana penguasa mempertimbangkan pengaruh budaya dalam menentukan sikapnya. Selain harus mempertimbangkan nilai budaya yang ada pada suatu Masyarakat. Dengan memaknai nilai-nilai hukum tersebut maka tujuan dari hukum akan mencapai suatu kepastian. Sehingga semua elemennya saling menunjang dalam mengatasi permasalahan yang timbul khususnya dalam penyelenggaraan notaris elektronik berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

Nilai hukum dapat dilihat dari norma dasar kewenangan notaris yang sampai saat ini dapat dilihat pada Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dimana pasal tersebut memberikan legitimasi pada jabatan Notaris. Pada konsep itu jabatan notaris tugasnya diatur dengan undang- undang. Tradisi hukum *civil law* dan *common law* mempengaruhi cara bekerja notaris saat ini. Sehingga tradisi mana yang dominan sangat bergantung pada instrument hukum yang disiapkan negara dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan. Keadilan itu mengikuti waktu, masa, tempat dan peradaban manusia. Sehingga keadilan itu dinamis. Sehingga jika tujuan hukum adalah keadilan maka hukum itu tumbuh bersama kepentingan yang membutuhkan keadilan.

Dengan itu akan terlihat bagaimana eksistensi kewenangan notaris elektronik sebagai pejabat umum dalam melaksanakan wewenang-wewenangnya. Seorang pejabat dalam melakukan tindakan harus berdasarkan kewenangan yang telah diberikan padanya. Akibat salah menerapkan kewenangan terjadi banyak persoalan. Persoalan-persoalan yang dihadapi seorang Notaris biasanya dikarenakan sikap ketidakprofesionalan sehingga menyebabkan terjadinya persoalan-persoalan

administrasi maupun persoalan hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata (Budiman, 2023).

Dalam rangka terjadi gugatan perdata terkait produk E-Notary, terdapat perlindungan hukum yang dapat dilihat dari aspek, hukum perdata, hukum kenotariatan, hingga hukum administrasi. Dalam hukum perdata, gugatan yang mungkin dilakukan adalah wanprestasi jika menyangkut para pihak yang bersengketa. Jika terdapat kelalaian dari Notaris dapat dilakukan gugatan melawan hukum. Atau jika terindikasi adanya delik pidana maka dapat dilakukan tuntutan pidana. Bahkan, bila Notaris lalai dalam menggunakan sistem elektronik sehingga tidak memenuhi unsur keabsahan dalam memperlakukan dokumen, selain dapat digugat secara perdata, juga dapat diberikan sanksi administrasi. Sanksi administrative dapat berupa teguran lisan, tulisan, pemberhentian sementara dan sampai pemberhentian tidak hormat.

Cara kerja Notaris berubah, ada nilai hukum pula yang bergeser. Bahkan teknologi *blockchain* menjadi niscaya, yang memungkinkan pencatatan transaksi secara aman dan transparan. Blockchain menyediakan rekam jejak permanen untuk setiap perubahan atau modifikasi pada dokumen, sehingga mengurangi risiko pemalsuan dan kecurangan. Bagaimana integrasi teknologi ini menyeimbangkan antara inovasi dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Di Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menyediakan landasan hukum untuk penggunaan tanda tangan elektronik. Namun, penerapan teknologi notaris elektronik memerlukan penyempurnaan lebih lanjut dalam regulasi kenotariatan, terutama dalam hal memastikan legalitas

dan validitas dokumen yang dihasilkan secara digital. Aspek yang harus diperhatikan adalah keamanan cyber yang rentan akan serangan, pencurian data, atau manipulasi dokumen. Oleh karena itu, pengamanan teknologi yang digunakan oleh notaris elektronik harus sesuai dengan standar keamanan tinggi. Ini termasuk penggunaan enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan pemantauan jaringan secara terus-menerus untuk mendeteksi potensi ancaman. Keamanan ini tidak hanya melindungi dokumen, tetapi juga menjaga privasi klien dan integritas proses kenotariatan itu sendiri. Baru-baru ini pusat data nasional Indonesia disibukkan dengan kebocoran data dari pusat data nasional. Dimana terganggunya layanan public di beberapa Kementerian dan Pemerintahan. Tentu hal ini dapat mengganggu kerja Notaris elektronik. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pusat Data Nasional (PDN) adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. PDN berfungsi sebagai pusat data yang digunakan bersama oleh instansi pusat dan pemerintah daerah serta saling terhubung. Semua layanan notaris saat ini menggunakan aplikasi, dari mulai akun notaris, hingga perpajakan. Semua bersumber pada aktifitas digital.

Resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan dalam adopsi notaris elektronik. Beberapa notaris tradisional mungkin merasa nyaman dengan metode kerja konvensional dan skeptis terhadap teknologi baru. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting dalam mendukung implementasi notaris elektronik. Pemerintah harus menyediakan regulasi yang jelas dan mendukung, sementara sektor swasta, terutama perusahaan teknologi, harus menyediakan platform yang aman dan dapat

diandalkan untuk digunakan oleh para notaris. Sinergi antara kedua pihak ini akan menjadi kunci keberhasilan integrasi teknologi dalam layanan notaris di Indonesia. Di masa depan, integrasi teknologi dalam bidang hukum dan notaris elektronik akan terus berkembang, mendorong inovasi baru yang lebih canggih. Misalnya, kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk mempercepat proses pemeriksaan dokumen, atau teknologi biometrik dapat diterapkan untuk meningkatkan keakuratan identifikasi dalam proses kenotariatan. Dengan perkembangan ini, diharapkan sistem hukum dan notaris di Indonesia akan menjadi lebih efisien, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital.

Beberapa prinsip hukum harus dikedepankan dalam menyikapi E-Notary. Prinsip tersebut yaitu; prinsip itikad baik untuk seluruh transaksi elektronik, prinsip keseimbangan yang memperhatikan hak dan kewajiban para pihak, termasuk hak atas data pribadi, prinsip kepastian dan perlindungan hak yang memberikan kesetaraan antara dokumen elektronik dengan dokumen fisik, prinsip akuntabilitas dimana Notaris dan penyedia jasa harus bertanggungjawan atas semua Tindakan E-Notary.

Dokumen elektronik merupakan dokumen otentik yang sah. Hal itu karena notaris memiliki kewenangan dalam melakukan *Certification Authority (trusted third party)* yang dapat menerbitkan sertifikat digital. Berkas elektronik tersebut perlu dikaji melalui Pasal 1868 KUHperdata yang mengurai tentang akta otentik (Bungdiana & Lukman, 2023). Pasal 1868 KUHPperdata, mengurai syarat akta otentik yaitu; harus dibuat dalam bentuk dan format yang telah ditentukan undang-undang, akta dibuat oleh dan dihadapan seorang pejabat umum dan pejabat tersebut harus memiliki kewenangan. Pasal 1869 KUHPperdata memberikan batasan akta dapat menurun

kedudukannya menjadi akta di bawah tangan bila 1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan; atau 2. Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan; atau Cacat dalam bentuknya. Mengenai cacat dalam bentuknya konsekuensinya adalah sebagai akta oetentuk tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan (Setiadewi & Wijaya, 2020).

Perlu mempelajari berbagai regulasi di berbagai negara untuk melihat bagaimana negara lain dengan tradisi hukum yang berbeda menanggapi perubahan cara kerja notaris. Lalu standar global perlu ditetapkan dengan mengakomodir nilai-nilai yang ada pada suatu negara. Termasuk nilai etika dan moral dalam berhukum.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan notaris elektronik di Indonesia menghadapi ancaman besar yang menghadirkan tantangan akibat benturan dengan tradisi hukum civil law. Tradisi hukum civil law menekankan kehadiran fisik notaris dalam proses pembuatan akta otentik dan berakibat pada pembuktian dan alat bukti yang dihasilkan dari E-Notary. Produk E-Notary merupakan bentuk transformasi dari akta otentik yang dihasilkan dari mekanisme digital. UUJN-P. Secara normatif, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) belum secara eksplisit mengatur produk E-Notary.

Posisi hukum produk E-Notary dalam sistem hukum Indonesia saat ini berada pada fase interpretasi hukum progresif yang berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum tradisional dengan realitas inovasi digital. Dimana hukum tidak sekedar diterapkan berdasarkan norma yang kaku. Ada Upaya menjembatani antra asas hukum klasik dengan kebutuhan

akan kecepatan, efisiensi dan aksesibilitas digital.

Kekuatan pembuktian produk E-Notary bergantung pada pemenuhan kriteria akta otentik sebagaimana yang diatur dalam KUHPPerdata dan UUJN-P. Kekuatan pembuktian E-Notary memperhatikan unsur formil dan substantial akta dengan mempertimbangkan standar verifikasi digital yang berlaku. Sehingga perlindungan yang efektif bagi para pihak meliputi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif meliputi penyusunan prosedur autentikasi elektronik yang ketat, sertifikasi keamanan data, dan penerapan standar profesionalisme notaris dalam layanan digital. Sementara itu, perlindungan represif harus mencakup akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Dengan memperkuat perlindungan hukum pada kedua tahap tersebut, sistem hukum Indonesia dapat memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penggunaan produk E-Notary, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam praktik kenotariatan digital.

Untuk itu saran yang ditawarkan adalah reformasi hukum yang adaptif, penerapan teknologi keamanan tinggi, serta pendekatan transisi bertahap yang mengkombinasikan sistem digital dengan prosedur konvensional. Bagi Organisasi Notaris dan Unsur Pengawasan Notaris diperlukan control yang ketat dan canggih. Pemerintah bersama-sama dengan Organisasi Notaris dan Kementerian terkait perlu membekali pelatihan teknologi dan penerapannya dalam profesi. Dengan mengintegrasikan teknologi dan nilai-nilai hukum yang ada, notaris elektronik bisa menjadi instrumen yang efisien dan aman dalam memberikan layanan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengorbankan prinsip dasar keadilan,

kepastian hukum, dan kesebandingan hukum. Untuk mencapai kesebandingan hukum dalam notaris elektronik, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara aksesibilitas layanan dengan tingkat pengawasan dan kontrol yang ketat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561. <https://doi.org/10.56301/CSJ.V6I2.1078>
- Alkatiri, N. H., Putra, M. F. M., & Ongko, K. (2023). A Legal Perspective: Implementing an Electronic Notarization System in Indonesia in the Post-Pandemic Era. *Jambura Law Review*, 5(2), 332–355. <https://doi.org/10.33756/JLR.V5I2.19221>
- Antari, P. E. D. (2022). The Implementation of Omnibus Law in Indonesia Law Making Process on Philosophy Review. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15757>
- Ariawan, I. G. K. (2013). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF. *Kertha Widya*, 1(1). <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419>
- Aulia, H., Ranti, ;, Mayana, F., & Badar Baraba, ; (2023). PELAYANAN NOTARIS SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 5(1), 91–106. <https://doi.org/10.23920/JPHP.V5I1.1405>
- Bharvada, K. (2002). Electronic Signatures, Biometrics and PKI in the UK. *International Review of Law, Computers & Technology*, 16(3), 265–275. <https://doi.org/10.1080/136008602760586723>
- Budiman, M. (2023). PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA PENCUCIAN

UANG. *LITIGASI*, 24(2), 299–321.

<https://doi.org/10.23969/LITIGASI.V24I2.9966>

Bungdiana, D., & Lukman, A. (2023). Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 309–318.
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216/http>

Disemadi, H. S. (2022). DATA OWNERSHIP IN REGULATING BIG DATA IN INDONESIA THROUGH THE PERSPECTIVE OF INTELLECTUAL PROPERTY. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 13(2), Article 2.
<https://doi.org/10.18860/j.v13i2.17384>

Fahamsyah, E., Taniady, V., Rachim, K. V., & Riwayanti, N. W. (2022). Penerapan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare Terhadap Pelaku Cybercrime Lintas Negara Melalui Ratifikasi Budapest Convention. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15731>

Gondo, S., Prodi, H., Kenotariatan, M., & Surabaya, U. (2022). Sah Tidaknya Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Teori Hukum Positif Yang Berlaku. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(3), 566–578.
<https://doi.org/10.53515/QODIRI.2022.19.3.566-578>

Hutauruk, R. H., Sudirman, L., Disemadi, H. S., & Tan, D. (2023). CONVERGENCE OF CONSUMER PROTECTION, INVESTMENT LAW, AND CYBERSECURITY: An in-Depth Analysis of Three-Way Legal Intersections in Investment Apps. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/j.v14i1.21180>

Indrapradja, I. S. (2018). PROBLEMATIKA PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS. *LITIGASI*, 19(2).
<https://doi.org/10.23969/LITIGASI.V19I2.2102>

Kadir, A., & Musataklima, M. (2024). COMMUNITY BANK AS THE PHILOSOPHICAL RATIO LEGIS BEHIND THE PROHIBITION OF

ISLAMIC RURAL BANKS FROM OFFERING DIRECT DEBIT IN CONSTITUTIONAL COURT RULINGS: Impacts and Solutions in The Digital Financial Era. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/j.v15i2.26582>

Kadek, N., & Widiasih, A. E. (2020). A Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary). *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(1), 150–160. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.V05.I01.P13>

Kalkhove, B. A., Rohani, S., & Alhadiansyah, A. (2023). UPAYA NOTARIS DALAM MENGHADAPI TANTANGAN PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PENGHADAP DI ERA DIGITAL. *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal*, 1(2), 90–111. <https://doi.org/10.26418/TABJ.V1I2.63728>

Kobis, F. (2017). KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT MENURUT HUKUM ACARA PERDATA. *LEX CRIMEN*, 6(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/16675>

Koos, S. (2023). The Digitization of Notarial Tasks - A Comparative Overview and Outlook of 'Cyber Notary' In Indonesia and Germany. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.1>

Lubis, I., Sukarja, D., Rosmalinda, & Murwadji, T. (2022). Penetration of International Economic Law in the Development of the Cyber Notary Concept in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 22(1), 125–138. <https://doi.org/10.30631/ALRISALAH.V22I1.868>

Lyta, O. :, Sihombing, B., & Kenotariatan, M. (2020). KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA NOTARIS. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 8(1), 134–134. <https://doi.org/10.37081/ED.V8I1.1515>

Maani, S. F. (2024). Urgensi dan Formalitas Perlekatan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta Notaris: Jabatan Notaris, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Ilmu Daktiloskopi. *Jurnal Inovasi Global*, 2(2), 257–265. <https://doi.org/10.58344/JIG.V2I2.59>

- Maulina, S., Rasyid, M. N., & Yusri, Y. (2021). Konsep dan Pelaksanaan Tugas Profesi Notaris Secara Elektronik (Electronic Notary). *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 7(2), 234–257. <https://doi.org/10.32503/DIVERSI.V7I2.1842>
- Nadia, W. S. (2018). *Kekuatan Hukum Akta Notaris Berdasarkan Cyber Notary Menurut Sistem Hukum di Indonesia*. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6041>
- Najib, A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM KEAMANAN DATA CYBER NOTARY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1), 43–59. <https://doi.org/10.23920/ACTA.V7I1.1680>
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mandar Maju.
- Pangesti, S., Darmawan, G. I., & Limantara, C. P. (2021). The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia. *Rechtsidee*, 7(0), 10.21070/jjhr.2020.7.701. <https://doi.org/10.21070/jjhr.2020.7.701>
- Permadi, I., Maharani, D. P., & Ahmad, M. Y. (2024). LEGAL PERSPECTIVES ON DIGITALISING LAND CERTIFICATES: Analyzing Synchronization and Harmonization in Indonesia's Job Creation Law. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/j.v15i2.28859>
- Prakoso, M. T. M., & Sukirno, S. (2023). Notary Ethics and Profession: The Consequences of Sanctions for Violating the Code of Ethics. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 114–125. <https://doi.org/10.37276/SJH.V5I1.266>
- Pratama, Y. O. (2022). Makna Berhadapan Dengan Notaris Pada Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diselenggarakan Secara Elektronik. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 58–69. <https://doi.org/10.32816/PARAMARTA.V21I2.167>
- Puspitasari, A., & Wahyudi, E. (2023). Analisis Urgensi Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Secara Elektronik. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(2), 176–185. <https://doi.org/10.55606/JHPIS.V2I2.1630>

- Sahdan, T. A., & Kucoro Sasmita, N. (2023). Penerapan Notaris Elektronik dalam Era Digital. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/10.61292/ELJBN.V1I1.18>
- Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H. (2020). LEGALITAS AKTA NOTARIS BERBASIS CYBER NOTARY SEBAGAI AKTA OTENTIK. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 126–134. <https://doi.org/10.23887/JKH.V6I1.23446>
- Setiawan, A. (2017). PENALARAN HUKUM YANG MAMPU MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM SECARA PROPORSIONAL. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 204–215. <https://doi.org/10.35194/JHMJ.V3I2.257>
- Sugianto, Q. F., Program, W. H., & Kenotaritan, S. M. (2020). PELUANG DAN TANTANGAN CALON NOTARIS DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN DISRUPSI ERA DIGITAL. *Notarius*, 12(2), 656–668. <https://doi.org/10.14710/NTS.V12I2.29004>
- Susanto, A. F., Tedjabuwana, R., Septianita, H., & Pratama, M. A. (2022). PENDIDIKAN HUKUM DI ERA DIGITALISASI. *LITIGASI*, 23(2), 234–252. <https://doi.org/10.23969/LITIGASI.V23I2.6216>
- Tan, D. (2020). CYBER-NOTARIES FROM A CONTEMPORARY LEGAL PERSPECTIVE: A PARADOX IN INDONESIAN LAWS AND THE MARGINAL COMPROMISES TO FIND EQUILIBRIUM. *Indonesia Law Review*, 10(2), 1. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n2.635>
- The Complete Guide to Remote Online Notarization: How new laws, technologies, and consumer demand are reshaping the notarial act and the future of trust in the digital age: MacDougall, Andrew, Chodos, Michael: 9781796910858: Amazon.com: Books.* (n.d.). Retrieved February 25, 2025, from <https://www.amazon.com/Complete-Guide-Remote-Online-Notarization/dp/1796910856>
- TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI DI INTERNET | Maulida | *Dinamika*. (n.d.). Retrieved February 25, 2025, from <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23680>

Available online at: journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi

Jurnal LITIGASI, Vol. 26 (1) April, 2025, p. 409-447
doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19193

Wati, T. (2023). Kekuatan Hukum dan Aspek Keamanan Dalam Tanda Tangan Elektronik. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(1), 752–762.
<https://doi.org/10.61722/JSSR.V1I2.394>